

RISALAH KEBIJAKAN

Membangun Ketahanan Iklim di NTB Melalui Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Sosial Adaptif

Graciella Stevani Gulo, Farhan Habibie, dan Muhammad Aldi*

 Oktober 2025

Ringkasan Eksekutif

Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama kelompok miskin dan rentan, memiliki kapasitas adaptasi rendah terhadap kenaikan muka air laut sebagai dampak perubahan iklim. Sistem perlindungan sosial yang ada masih berfokus pada bantuan rutin bagi keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum cukup responsif terhadap risiko bencana. Risalah kebijakan ini menyoroti meningkatnya kerentanan kelompok rentan, ketimpangan penerima bantuan sosial, hilangnya mata pencaharian di sektor primer, serta belum siapnya mekanisme bantuan sosial pascabencana kenaikan muka air laut. Untuk itu, direkomendasikan tiga langkah utama: 1) mendorong keragaman mata pencaharian di wilayah terdampak; 2) menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Sosial Adaptif (RAD PSA) Provinsi NTB; dan 3) memperbarui dan mengintegrasikan data lintas sektor agar kebijakan lebih adaptif dan tepat sasaran.

Kata kunci: *perlindungan sosial adaptif, kenaikan muka air laut, kelompok rentan, RAD PSA*

Latar Belakang

Provinsi NTB merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya kenaikan muka air laut. Dampaknya tidak hanya pada tingkat paparan terhadap risiko iklim, tetapi juga jenis mata pencaharian yang mudah terdampak dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi. Kelompok masyarakat miskin dan rentan cenderung memiliki kapasitas adaptasi yang rendah (World Bank, 2024).

Data BPS (2025), persentase penduduk miskin di NTB mencapai 11,78%, sedikit menurun dari 11,91% pada 2024. Namun, masih di atas rata-rata nasional sebesar 8,47%. Kondisi ini menunjukkan pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah provinsi NTB. Upaya tersebut dapat terhambat jika dampak sosial akibat perubahan iklim tidak diantisipasi secara serius.

* Analisis Kebijakan di SKALA dan United Nations Global Pulse Asia Pacific (UNGP AP).

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023), mencatat periode 1901–2018, rata-rata tinggi muka air laut global meningkat sekitar 0,20 meter. **Di Indonesia, laju kenaikan permukaan laut diperkirakan mencapai 8–12 mm per tahun akibat peningkatan suhu global (Bappenas, 2021)**. Fenomena ini juga dapat mengancam masyarakat pesisir di NTB yang sebagian wilayahnya berpotensi terdampak banjir rob. Dampak tersebut kian berat karena banyak kelompok masyarakat belum memiliki akses perlindungan sosial yang memadai untuk pemulihan pascabencana.

Saat ini, sistem perlindungan sosial di Indonesia masih berfokus pada bantuan rutin bagi keluarga miskin dalam DTKS sehingga kurang responsif terhadap situasi

darurat seperti bencana kenaikan muka air laut. Akibatnya, masyarakat rentan di luar DTKS sering terlewat. Karena itu, strategi PSA perlu dikembangkan agar data dan bantuan lebih akurat serta terintegrasi dengan sistem peringatan dini dan manajemen risiko bencana.

PSA telah menjadi salah satu arah pembangunan Provinsi NTB dalam RPJPD 2025–2045. Akan tetapi, implementasinya masih terbatas. Oleh karena itu, risalah kebijakan ini merekomendasikan penyusunan RAD PSA sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir NTB terhadap dampak perubahan iklim, khususnya kenaikan muka air laut.

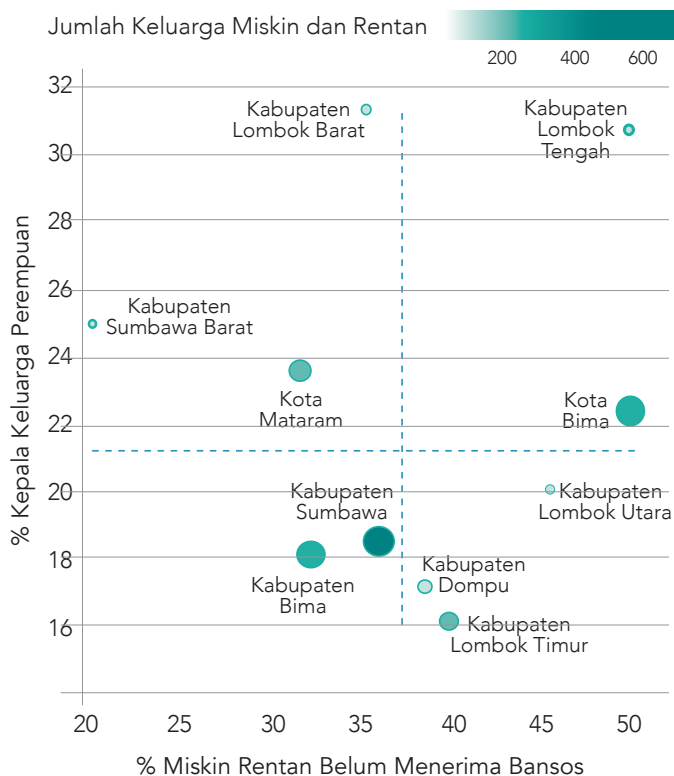
Deskripsi Masalah

Analisis pentingnya RAD PSA untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir NTB dilakukan dengan memetakan potensi dampak kenaikan satu meter muka air laut. Analisis ini menggunakan data Regsosek 2022 dan proyeksi kenaikan muka air laut dari United Nations Global Pulse Asia Pacific (UNGP AP).¹ Jika kenaikan muka air laut terjadi, beberapa masalah yang muncul antara lain:

Meningkatnya kerentanan kelompok rentan. Kabupaten Sumbawa berpotensi memiliki tingkat paparan tertinggi terhadap kenaikan muka air laut (0,3%) dan persentase terbesar kelompok rentan terdampak, yaitu lansia (2,04%), kepala keluarga perempuan (1,38%), dan pekerja informal (12,05%). Di sisi lain, Lombok Utara mencatat proporsi tertinggi penduduk miskin dan rentan yang berpotensi terdampak, sementara Kota Mataram memiliki kelompok tidak bekerja tertinggi yang rentan terhadap perubahan iklim (7,16%).

Ketimpangan penerima bantuan sosial. Data Regsosek pada Gambar 1 menunjukkan masih banyak keluarga miskin rentan di NTB yang berisiko terdampak kenaikan muka air laut, tetapi belum menerima bantuan sosial. Bantuan sosial itu seperti Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, serta berbagai program bantuan dari pemerintah daerah. Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Bima memiliki proporsi tertinggi keluarga miskin dengan kepala keluarga perempuan yang belum terjangkau bantuan sosial. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan dan kerentanan ganda di kelompok tersebut.

Gambar 1. Profil Keluarga Miskin Rentan yang Belum menerima Bantuan Sosial di Area Terdampak Kenaikan Muka air Laut



Sumber: Regsosek, 2022

Hilangnya mata pencaharian sektor primer. Sektor pekerjaan yang paling berpotensi terdampak kenaikan muka air laut adalah sektor primer, meliputi pertanian, perikanan, dan pertambangan. Dampak yang terbesar tercatat di Kabupaten Lombok Tengah (62,07%), Kabupaten Sumbawa Barat (54,76%), Kabupaten Lombok Timur (57,05%), dan Kabupaten Sumbawa (56,18%).

¹ Analisis dampak kenaikan muka air laut terhadap layanan dasar dilaksanakan oleh Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri yang didukung oleh Program SKALA dan United Nations Global Pulse.

Sementara itu, di wilayah seperti Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Dompu, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Bima, sektor tersier menjadi yang paling terdampak dengan proporsi di atas 50%.

Belum siapnya mekanisme pemberian bantuan sosial pascabencana. Saat ini, penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana umumnya dilakukan setelah kejadian melalui pengajuan ke pemerintah daerah.

Sumber dananya masih bergantung pada pos dana tidak terduga pemerintah provinsi. Meskipun arah kebijakan menuju PSA adaptif mulai disusun, implementasinya belum secara khusus menangani dampak perubahan iklim. Selain itu, Dinas Sosial Provinsi NTB menghadapi kendala dalam pemutakhiran data karena proses verifikasi dan validasi (verivali) DTKS sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

Kebijakan yang Disasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB 2025—2045
- Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi NTB 2025—2045.

Rekomendasi Kebijakan

1. Penyusunan RAD PSA Provinsi NTB

Pemerintah Provinsi NTB perlu menyusun RAD PSA yang sejalan dengan arah RPJPD Provinsi NTB. Dokumen ini penting agar perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai respons jangka pendek, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang tangguh terhadap perubahan iklim.

2. Pemutakhiran dan integrasi data sosial serta risiko iklim

Diperlukan pemutakhiran dan pengintegrasian antara data kemiskinan, kebencanaan, dan risiko iklim agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran, responsif, dan berkelanjutan. Diharapkan Portal Data Daerah juga menjadi instrumen yang memuat hasil pemutakhiran dan integrasi data tersebut.

3. Pengembangan beragam mata pencaharian di wilayah rawan dampak iklim

Sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan merupakan yang paling rentan terhadap kenaikan muka air laut. Pemerintah Provinsi NTB dapat mendorong pengembangan beragam sumber mata pencaharian melalui penguatan usaha mikro, ekonomi kreatif, dan pelatihan keterampilan baru yang lebih adaptif. Langkah ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dan mengurangi ketergantungan pada sektor yang berisiko tinggi.

Disclaimer: Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

 skala.or.id  info@skala.or.id

 <https://s.id/Channel-SKALA>

